

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Jawa Barat pada Triwulan III tahun 2021 berada di bawah target inflasi Nasional sebesar $3\% \pm 1\%$. Realisasi inflasi Jawa Barat pada triwulan III 2021 yang sebesar 1,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 yang sebesar 1,46% (yoy) namun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III 2020 yang sebesar 1,77% (yoy). Meskipun Inflasi Jawa Barat masih berada di bawah target inflasi Nasional, namun secara triwulanan mengalami peningkatan apabila dibanding periode sebelumnya. Keterbatasan pasokan di beberapa jenis komoditas pangan strategis seperti hortikultura dan pembatasan mobilitas melalui kebijakan PPKM level yang mempengaruhi transmisi arus barang, menjadi penyebab utama peningkatan inflasi. Melihat lebih dalam, peningkatan inflasi pada triwulan III 2021 terutama disebabkan inflasi pada bulan Juli dan Agustus 2021 yang terjadi merata di hampir seluruh wilayah. Beberapa komoditas utama Jawa Barat mengalami inflasi beserta andilnya antara lain rokok kretek filter (0,0160%), minyak goreng (0,0158%), sewa rumah (0,0133%), rokok putih (0,0126%), dan papaya (0,0066%). Sementara itu, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi) di Jawa Barat antara lain: telur ayam ras (-0,0752%), bawang merah (-0,0408%), cabai rawit (-0,0206%), cabai merah (-0,0192%), dan daging ayam ras (-0,0181%). Tekanan inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran barang dan jasa di triwulan III 2021 masih cukup terkendali. Dari 11 kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi periode laporan bersumber dari kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,62% (yoy); kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,16% (yoy); dan kelompok Pendidikan sebesar 2,77% (yoy). tingginya inflasi kelompok Makanan dan Minuman/Restoran disebabkan oleh peningkatan harga komoditas Nasi dengan Lauk sebagai dampak dari penerapan PPKM level pada triwulan III 2021 (sebelumnya pada triwulan II 2021 kebijakan PPKM darurat), sehingga mendorong peningkatan permintaan masyarakat khususnya restoran dan kafe serta keterbatasan produksi komoditas pangan strategis salah satunya komoditas hortikultura (periode tanam). Adapun inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh komoditas Minyak Goreng sebagai dampak peningkatan harga CPO global seiring melambungnya harga minyak mentah di pasaran dimana CPO merupakan bahan baku biodiesel yang menjadi substitusi bahan bakar minyak mentah dan peningkatan pajak ekspor CPO dari dalam negeri dan pajak impor dari negara tujuan ekspor; komoditas hortikultura (Tomat, Cabai Merah, dan Cabai Rawit) seiring periode tanam; komoditas Tahu dan Tempe seiring peningkatan harga komoditas kedelai; serta Rokok Kretek Filter sebagai dampak kenaikan cukai tembakau. Sementara inflasi kelompok Pendidikan didorong oleh peningkatan biaya/tarif pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi seiring tahun ajaran baru. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, Kota Bogor tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni 1,92% (yoy). sementara Kota Tasikmalaya merupakan yang terendah dengan tingkat inflasi sebesar 1,18% (yoy). Inflasi yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh peningkatan harga komoditas Minyak Goreng, Daging Ayam Ras, dan Tempe. Peningkatan harga komoditas global dan peningkatan harga DOC serta adanya peralihan peternak dari peternak daging ke peternak layer di sentra produsen menjadi penyebab peningkatan harga komoditas pangan di Kota Bogor. Sementara komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan harga di Kota Bogor antara lain Telur Ayam Ras, Emas Perhiasan, dan Cabai Merah. Terkait rendahnya harga Telur Ayam Ras dan Cabai Merah disebabkan oleh belum pulihnya permintaan masyarakat pada saat penerapan kebijakan PPKM level di saat kondisi pasokan cukup melimpah. Sementara penurunan harga Emas Perhiasan sejalan dengan penurunan harga emas global.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan roadmap pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi selama triwulan-III 2021 yaitu: 1. Melimpahnya stok komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras akibat rendahnya serapan pasar (terbatasnya permintaan); 2. Masih terbatasnya daya beli masyarakat meskipun sudah diterapkan AKB; 3. Ketersediaan data harga pangan masih terbatas. 4. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jawa Barat berakhir di tahun 2021

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam range target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sebagai berikut: 1. Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jabar Tahun 2021, merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat, khususnya dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Capacity Building TPID se-Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan awareness dan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian inflasi daerah untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Bekerjasama dengan Shopee dalam kampus UMKM Shopee Ekspor 4. Mengeluarkan kebijakan dining in untuk resto dan kafe outdoor 5. Penguatan ketersediaan pangan melalui gerakan pangan mandiri, pennebaran 100.000 benih benih ikan untuk menjaga ekosistem alam, budidaya ikan metoda bioflok kepada pesantren, dan program petani milenial 6. kerjasama dengan provinsi Bali dalam program beli-bali sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. 7. Kerjasama dengan 27 Kabupaten/Kota implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam mengendalikan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya seperti: 1. Perlunya optimalisasi sinkronisasi program kerja terkait pengendalian harga antar Lembaga/instansi terkait; 2. Awareness Kepala Daerah terkait program pengendalian inflasi; dan 3. Minimnya dukungan pasokan data pantauan harga pangan strategis beberapa daerah di Jawa Barat sehingga diperlukan aksi untuk penguatan data harga pangan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode triwulan-III 2021 diantaranya: 1. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kebijakan SPBE, dapat digunakan sebagai dasar dalam akselerasi penguatan data harga pangan yang lebih efektif dan efisien melalui integrasi aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA) dengan aplikasi harga pangan yang dimiliki oleh daerah (Kabupaten/Kota) 2. Penyusunan road map pengendalian inflasi di Jawa Barat Periode 2022-2024